



**PUTUSAN**

**Nomor 2115/Pdt.G/2024/PA.Ba**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kab Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARMONO, S.H., M.M., CLA, Advokat yang berkantor di Jalan Bambang Sugeng No 32 Eks Stasiun PJKA Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Email: baristerkecce@gmail.com dan cakrakeadilanabadi@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register 1535/XI/2024/PA.Ba tanggal 25 November 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 2115/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2024/PA.Ba



pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 16 Desember 2018 sesuai dengan buku kutipan akta nikah nomor 0249/020/XII/2018, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara setelah menikah tergugat mengucapkan janji taklik nikah sesuai buku kutipan akta nikah;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Karangobar RT 01. RW. 01 Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara kurang lebih 2 minggu setelahnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Surabaya, Penggugat dan Tergugat menyelesaikan Pendidikan Magister strata S2. Setelah itu Tergugat diterima kerja di Bandung di PT. Len Railway System Jl. Soekarno Hatta Gedung Giri Suseno (T) No.442, Pasirluyu, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat. Pengugat tinggal di Surabaya sedangkan Tergugat tinggal di Bandung sehingga menyebabkan Tergugat dan Penggugat Hidup hubungan jarak jauh atau LDR serta tidak dapat tinggal bersama;
3. Bahwa setelah Pengugat menyelesaikan Pendidikan di S2 di Surabaya Penggugat menyusul Tergugat dan tinggal bersama di Bandung kurang lebih selama 2 Tahun Lamanya;
4. Bahwa sekitar tahun 2022 akhir Penggugat diterima Kerja sebagai Dosen Terbang (jam mengajarnya tidak full) di Yogyakarta yang menyebabkan Pengugat harus berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat tinggal di Yogyakarta saat ada jam mengajar sedangkan Tergugat tinggal di Bandung, karena jam mengajar tidak full maka Penggugatpun setiap minggu pulang rumah orang tua di Kecamatan Karangobar, Kab. Banjarnegara, dan saat rumahtangganya masih rukun tergugatpun sering mengunjungi Penggugat di rumah orangtua Desa Karangobar kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan badha al dukhul (melakukan hubungan suami istri) dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering

*Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2024/PA.Ba*



Terjadi Pertengkaran dan Perselisihan yang menyebabkan hubungan keluarga menjadi tidak harmonis disebabkan karena.;

6.1 Bahwa sejak awal menikah sudah sering terjadi cek cok, pertengkaran tentang hal-hal kecil akan tetapi Penggugat mencoba bersabar dalam menghadapi dan mempertahankan rumah tangganya sampai pada sekitar pertengahan tahun 2022 Penggugat diberikan uang oleh orang tuanya untuk membeli rumah di Yogyakarta secara diangsur bersama dengan Tergugat;

6.2 Bahwa Tergugat selalu merasa Penggugat adalah orang yang bodoh, beban dan tidak mandiri. Penggugat selalu diberikan kata-kata tersebut hingga penggugat harus mendatangi psikolog untuk memeriksakan Kesehatan mental Penggugat;

6.3 Tergugat sering mengunci Penggugat hingga dini hari atau baju dimasukkan kedalam tas agar Penggugat pergi dari tempat tinggal mereka saat pertengkaran terjadi;

6.4 Bahwa Penggugat mencoba membeli rumah di Yogyakarta dengan uang Rp 300 juta dari Orangtua Penggugat yang berlatar di Kab. Sleman rumah No. 94 RT 02 RW 13 Ngetak Dusun Bragasan Mayangan Desa Trihango Kecamatan Gamping Kab Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta posisi saat ini belum lunas masih diangsur dan tidak ditempati keduanya. Tetapi saat masih rukun ketika terjadi konflik, Tergugat sering mengunci Penggugat diluar rumah dan mengganti gembok rumah agar Penggugat tidak dapat masuk ke dalam rumah. ;

6.5 Setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu berfikir bahwa Penggugat adalah seorang yang munafik, suka selingkuh dan suka keluyuran tanpa ada bukti yang jelas bahwa Penggugat melakukan hal tersebut dan Tergugat selalu meminta semua uang yang pernah diberikan kepada Penggugat untuk dikembalikan;

7. Bahwa Orangtua Penggugat sudah melakukan mediasi sudah ditempuh sebanyak 2 kali;

a. Pada tahun 2022, Saat itu Tergugat berjanji kepada orang tua

*Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2024/PA.Ba*



Penggugat akan memperbaiki sikap dan akan rukun kembali serta memperlakukan Penggugat secara baik. ;

b. Pada Tahun 2023 oleh orangtua Penggugat juga melakukan Mediasi kembali serta orang tua menyerahkan keputusan untuk lanjut rumah tangga atau berpisah/bercerai dikembalikan kepada Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan 10 April 2024, setelah lebaran, Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk memutuskan BERCERAI masing-masing sudah berpisah lebih dari enam bulan, Penggugat saat ini tinggal di Desa Karangobar RT 01. RW. 01 Kec.Karangobar Kabupaten Banjarnegara. Tergugat kembali ke rumah Orangtuanya di JL. Asshodiqin Desa Karang Duwak, RT 003 RW 001 Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;

9. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa atas keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Banjarnegara dengan alasan Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga . sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) PP No 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

*Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2024/PA.Ba*



berikut.;

PRIMAIR

- 1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Menetapkan jatuhnya talak satu Bain sughra dari Tergugat Moh. Khoiron Bin Abd Rosyid, kepada Penggugat Penggugat;
- 3.Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarnegara, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang berupa:

- A. Surat



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK XXXXX tanggal 14-01-2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXX dan Tergugat nomor 0249/020/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara tanggal 16 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi

1. XXXXX, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua minggu), kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal disurabaya untuk menyelesaikan pendidikan Magister strata S2 setelah Tergugat diterima kerja di Bandung dan akhirnya Tergugat pindah tinggal di Bandung sedangkan Penggugat disurabaya, sehingga tidak dapat tinggal bersama dan setelah Penggugat lulus pendidikan S2 di Surabaya lalu menyusul Tergugat di Bandung dan tinggal bersama di Bandung selama 2 (dua) tahun, lalu pada tahun 2022 Penggugat diterima kerja sebagai Dosen di Yogyakarta sehingga tidak dapat tinggal bersama kembali Penggugat tinggal di Yogyakarta sedangkan Tergugat tinggal di Bandung;
- Bahwa Selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2024/PA.Ba



- dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak pertengahan tahun 2022 pernikahan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat mudah marah dan temperamental, bertengkar namun tidak jelas apa yang dipertengkarkan;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat selalu mengganggu Penggugat adalah orang bodoh, beban dan tidak mandiri, Tergugat juga sering mengunci Penggugat saat berada didalam rumah mau pun diluar rumah sampai dini hari saat di Yogyakarta dan memasukan baju Penggugat di tas agar Penggugat pergi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak 10 April 2024 telah pisah rumah, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak pisah rumah sudah tidak ada komunikasi yang baik;
  - Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXX, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua minggu), kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal disurabaya untuk menyelesaikan pendidikan Magister strata S2 stelah Tergugat diterima kerja di Bandung dan akhirnya Tergugat pindah tinggal

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2024/PA.Ba



dibandung sedangkan Penggugat disurabaya, sehingga tidak dapat tinggal bersama dan setelah Penggugat lulus pendidikan S2 di Surabaya lalu menyusul Tergugat di Bandung dan tinggal bersama di Bandung selama 2 (dua) tahun, lalu pada tahun 2022 Penggugat diterima kerja sebagai Dosen di Yogyakarta sehingga tidak dapat tinggal bersama kembali Penggugat tinggal di Yogyakarta sedangkan Tergugat tinggal di Bandung;

- Bahwa Selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak pertengahan tahun 2022 pernikahan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat mudah marah dan temperamental, bertengkar namun tidak jelas apa yang dipertengkarkan;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selalu menganggap Penggugat adalah orang bodoh, beban dan tidak mandiri, Tergugat juga sering mengunci Penggugat saat berada didalam rumah mau pun diluar rumah sampai dini hari saat di Yogyakarta dan memasukan baju Penggugat di tas agar Penggugat pergi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak 10 April 2024 telah pisah rumah, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak pisah rumah sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala

*Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2024/PA.Ba*



hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa pada tanggal 20 November 2024, kepada HARMONO, S.H., M.M., CLA Advokat yang beralamat di Jalan Bambang Sugeng No 32 Eks Stasiun PJKa Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Email: baristerkecce@gmail.com dan cakrakeadilanabadi@gmail.com, untuk bertindak atas nama Penggugat mewakili atau mendampingi dalam perkara Cerai Gugat Nomor 2115/Pdt.G/2024/PA.Ba di Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat tersebut sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2024/PA.Ba



oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Penggugat mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P.2). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena setelah hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat temperamental, mudah marah tanpa alasan yang jelas, bahkan kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2024 hingga sekarang 7 (tujuh) bulan, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut

*Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2024/PA.Ba*



jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dimaksud serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dapat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan penjelasan umum angka 4 huruf e dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo. Pasal 125 ayat (1) HIR. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dan dalil yang hanya bisa dibuktikan dengan bukti surat, karena berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan kaidah dalam kitab *Al Anwari*, Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *Apabila dia Tergugat enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasar bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P.1 - P.2) yang masing-masing telah dinazzegegel dan telah cocok sesuai dengan aslinya. Majelis menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2024/PA.Ba



sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Ayah Kandung Penggugat dan Tetangga Penggugat, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama IMROATUL HUDATI yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Majelis Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, serta menunjukkan inperson yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

*Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2024/PA.Ba*



tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Majelis menilai bukti P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Banjarnegara. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pernah melihat dan mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai sifat temperamental, mudah marah tanpa alasan yang jelas. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 7 (tujuh) bulan, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat.

*Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2024/PA.Ba*



Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini para saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena merasa kesulitan. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengalaman dan pengetahuan para saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan dengan dalil Penggugat, atau meskipun relevan dengan dalil Penggugat tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Desember 2018;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai sifat temperamental, mudah marah tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 7

*Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2024/PA.Ba*



(tujuh) bulan, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah merasa kesulitan;

#### **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam). Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam). Penggugat sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertolak belakang dengan fakta hukum angka 1 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan kemudian keduanya berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, hal itu menurut Majelis

*Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2024/PA.Ba*



merupakan indikasi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai sifat temperamental, mudah marah tanpa alasan yang jelas, maka Majelis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang bersifat prinsipil dan berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga, yakni Tergugat sebagai kepala rumah tangga seharusnya berusaha memberi pengayoman dan ketenangan kepada keluarga tetapi justru Tergugat mempunyai sifat temperamental, mudah marah tanpa alasan yang jelas, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan dengan aturan yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Tergugat dan Penggugat sebagai pasangan suami-isteri wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, serta saling menjaga kehormatan, dan secara psikologis membuat Penggugat hidup tidak tenang bahkan tersiksa atas sikap Tergugat, sekaligus secara sosiologis-psikologis menjadikan Penggugat merasa tidak percaya diri untuk bergaul di masyarakat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas menunjukkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas diperkuat dengan keterangan dari keluarga Penggugat yakni para saksi Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran kemudian keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang, sementara keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2024/PA.Ba



akan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi karena sudah merasa sulit;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak keluarga dekat Penggugat dan Tergugat sudah merasa sulit untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan Majelis Hakim juga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, sementara Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu maka Majelis hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga menceraikan keduanya merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ  
نَفْسَهُ

Artinya: “dan janganlah kamu mempertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”.

dan juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai



pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga", oleh karena itu maka Majelis menilai gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1), Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini diajukan oleh pihak isteri agar dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2024/PA.Ba



dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

**Penutup**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari Drs. Arifin sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M. Mursyid dan Drs. H. Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Abdul Hanief, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Arifin**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



ttd

Drs. H. M. Mursyid

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Hanief, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp78.000,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp333.000,00</b>

(tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)